



Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048

CATATAN EKONOMI DAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 2022

Samson Ganda J. Silitonga
Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia
samson.ganda@unpar.ac.id

Riwayat Artikel:

Received: 27-12-2022

Revised: 13-01-2023

Accepted: 20-01-2023

Keywords: covid-19 pandemic, economy and politics, indonesia, joko widodo president.

Kata Kunci: ekonomi dan politik, indonesia, pandemi covid-19, presiden joko widodo.

Abstract

Joko Widodo's leadership is considered democratic, even 'swinging'. But not all Indonesian people see it that way. For 2 years – the tightening of population mobility – these two aspects can become indicators that are raised to the surface as the social problems that are the most attention-grabbing, especially ahead of the 2024 leadership change. Apart from that, economically-politically, Indonesia is also facing difficult problems. The Indonesian middle class has different characteristics compared to its counterparts in Malaysia, Thailand and even Singapore. If so, is Indonesia's Political-Economy growing well and in line? What factors can have the most influence, especially when viewed from conditions throughout 2022? Most of these notes come from real records regarding the conditions of the Political Economy throughout 2022, which are seen through relevant theories. Interpretation or Social Hermeneutics is inevitable, which is mainly used as a data exploration method. In the final section, some tentative conclusions are presented.

Abstrak

Kepemimpinan Joko Widodo dianggap demokratis, bahkan 'mengayun'. Tetapi tidak seluruh masyarakat Indonesia melihat demikian. Selama 2 tahun –pengetatan mobilitas penduduk– kedua aspek itu dapat menjadi indikator yang diangkat ke permukaan sebagai masalah Sosial paling menyita perhatian, khususnya menjelang perubahan kepemimpinan 2024. Selain itu, secara Ekonomi-Politik, Indonesia juga menghadapi persoalan yang tidak mudah. Kelas Menengah Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding para saudaranya di Malaysia, Thailand, bahkan Singapore. Kalau begitu, apakah Ekonomi-Politik Indonesia bertumbuh dengan baik dan seiring sejalan? Faktor-faktor apakah yang paling dapat mempengaruhi, terutama jika dilihat dari kondisi sepanjang tahun 2022? Catatan ini sebagian besar berasal dari catatan riil mengenai kondisi-kondisi Ekonomi Politik sepanjang 2022, yang dilihat melalui teori-teori relevan. Tafsir atau Hermeneutika Sosial tidak terhindarkan, yang terutama digunakan sebagai metode penjelajahan data. Pada bagian akhir dikemukakan beberapa simpulan tentataif.

Corresponding Author: Samson Ganda J. Silitonga
E-mail: samson.ganda@unpar.ac.id



PENDAHULUAN

Tahun 2022 baru saja berlalu. Tetapi ingatan banyak orang sepanjang 2022 masih terasa di sana-sini, terutama pada masalah Ekonomi dan Politik. Catatan ini coba mendulang kembali ingatan tentang berbagai peristiwa tahun 2022, secara khusus berkaitan dengan Ekonomi Politik.

Pada awal tahun, kita tentu masih ingat terjadinya kelangkaan minyak goreng, hingga mengakibatkan pemecatan seorang menteri akibat tidak berhasil mengatasinya. Menjelang pertengahan tahun, perayaan Hari Besar keagamaan berlangsung dengan kewaspadaan akibat Pandemi *Covid-19* yang masih menyeruak, hingga Perayaan Proklamasi Kemerdekaan yang diisi hiburan rakyat. Untungnya, pada akhir tahun lalu, tepatnya 30 Desember 2022 pandemi *Covid-19* dinyatakan berakhir.

Seluruh aktifitas Ekonomi masyarakat Indonesia masih bertumpu pada aktifitas massal, kendati era Teknologis juga tidak terhindarkan. Kondisi ini melahirkan pertanyaan, apakah kita siap, terutama menyikapi hasil-hasil G-20 di Bali pada November lalu? Sementara aktifitas Ekonomi Digital tidak lagi mengandalkan mobilitas terbuka, melainkan tertutup, Ekonomi nasional beberapa tahun ke depan menjadi sebuah kesangsaan.

Dalam konteks Indonesia, geliat Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari bidang Politik. Dan yang lebih penting lagi, Ekonomi masyarakat Indonesia pada kelas bawah, tidak ekuivalen dengan Ekonomi kelas atas. Dan pada 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari panggung Politik Nasional meskipun usahanya untuk membangun Ekonomi kelas bawah tidak dapat diabaikan (khususnya melalui Koperasi).

Kita dapat belajar dari geliat ekonomi-politik tahun 2022 yang diuraikan berikut. Pada akhirnya, refleksi aktual memang sangat diharapkan supaya tidak hanya menjadi slogan biasa, sebagaimana biasanya dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode hermeneutika sosial merupakan proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah pesan baik berupa lisan atau tertulis untuk disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda, sehingga mereka mampu mengerti pembahasan yang disajikan dalam bahasa sebagai mediumnya. Disini, metode hermeneutika sosial menghubungkan secara erat antara “mengerti” dengan “bahasa”, sebab bahasa merupakan perantara nyata bagi keberlangsungan komunikasi dan hubungan umat manusia. Gadamer mengartikan hubungan “mengerti” dan “bahasa” tersebut sebagai suatu realitas yang membentuk kenyataan hidup manusia serta hal-hal yang mengelilinginya sebagai teks yang dapat dibaca maupun ditafsirkan olehnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Geliat Ekonomi 2022

Penjelasan kondisi Ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 dimulai dengan pernyataan pemerintah pada akhir 2021 yang menghilangkan bahan bakar Peralite, dan secara perlahan menggunakan Pertamina yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menggaungkan pernyataan bahwa masjid harusnya meningkatkan perekonomian umat. Hal barusan dinyatakannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan kantor Dewan Masjid Indonesia. Yusuf Kalla menyatakan pula, perekonomian umat masih tergolong rendah, bahkan di sekitar masjid.

Perayaan Imlek 2022 disertai turunnya hujan secara ekstrim, jatuh pada 1 Februari. Perayaan Imlek terkait dengan permulaan musim bunga dan masa mulainya bercocok tanam. Tetapi pada awal tahun ini, sebagai dampak penyerangan Rusia atas Ukraina, Indonesia mulai mulai alami kelangkaan bahan bakar dan bahan pangan, secara khusus minyak goreng. Pemerintah coba mengatasi meningkatnya harga minyak goreng dengan menetapkan harga eceran sebesar Rp.14.000. Kelangkaan tetap terjadi, yang menyebabkan harga itu tidak bisa dipertahankan. Lalu terjadi pula kenaikan harga komoditas lainnya seperti cabe dan daging ayam. Hal ini terjadi karena pasokan dan penyaluran berkurang akibat cuaca dan iklim yang tidak bersahabat. Pengaruh dinamika internal dan eksternal semakin tidak bisa dihindari.

Di tengah suasana Ekonomi yang baru saja menggeliat pasca Covid-19, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Bukan kebetulan, tanggal 31 Maret merupakan saat terakhir membuktikan Surat Pajak Terhutang (SPT) bagi setiap warganegara yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tanggal 3 April 2022 merupakan permulaan Puasa Ramadhan. Dalam suasana puasa, terjadi (lagi) peningkatan korban terinfeksi Omicron siluman yang merupakan bagian dari Covid-19. Disebut demikian karena varian Omicron banyak jumlahnya. Tetapi pemerintah tidak menjelaskan secara eksplisit, karena khawatir menciptakan gejolak Sosial dan Ekonomi, apalagi setelah Indonesia kadung dipercaya sebagai Negara yang berhasil mengatasi Covid-19. Media-media tidak lagi memberitakan peningkatan korban Omicron, sembari berjaga-jaga bilamana terjadi Perang Dunia III.

Pada 14 April 2022, Presiden Joko Widodo menyarankan pemudik tidak berangkat tanggal 28-29 dan 30 April 2022, tetapi menghindari kemacetan. Lalu pada 18 April 2022 ini, KontraS menyebut tokoh-tokoh berikut sebagai “Penjahat Demokrasi”, seperti: Luhut Panjaitan, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Dea Tunggaesti, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan. Istilah “Penjahat Demokrasi” berkaitan dengan kepentingan Ekonomi, tetapi dengan mengatasnamakan Demokrasi Politik.

Pada peringatan Hari Lahir RA. Kartini, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merasa heran jika ibu-ibu berbondong-bondong membeli baju baru anak, tetapi pada saat yang sama berbondong-bondong mengantri membeli minyak goreng, bahkan tidak kebagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena tidak mau mengikuti vaksinasi. Pada 21 April 2022 pula, sekelompok mahasiswa berdemonstrasi di istana maupun gedung DPR/MPR menuntut supaya harga-harga kebutuhan pokok distabilkan pemerintah, serta menolak penundaan pemilu. Pihak pendemo diterima Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco.

Dikutip dari KOMPAS TV, Presiden Joko Widodo dan pemerintah melarang ekspor minyak goreng, dimulai pada 28 April 2022. Hal ini terkait kelangkaan minyak goreng, sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan telah dinyatakan terlibat mafia perdagangan minyak goreng. Sehubungan dengan hal ini, YLKI menyatakan pelarangan ekspor tersebut dapat mengacaukan pasar, sementara para ekonom menyatakan pelarangan itu dapat merugikan RI hingga Rp. 43 Trilyun.

Presiden Joko Widodo, pada 29 April 2022 mengingatkan jajaran kabinet mengurangi import ~ dan sebaliknya, meningkatkan produksi, khususnya pada barang-barang konsumsi, seperti manufaktur dan alat-alat teknologi. Sedangkan beberapa daerah mulai mengalami perpindahan channel menuju TV digital mulai 30 April 2022. Perpindahan ini menandai media pertelevisiaan kini memasuki era teknologi yang sophisticated sejak 1962.

Jika di Indonesia Idul Fitri jatuh pada 2 Mei, otoritas Singapura menyampaikan Idul

Fitri jatuh pada tanggal 3 Mei 2022. Bersamaan dengan itu, otoritas Singapura pula menyampaikan bahwa kemungkinan dunia akan mengalami resesi selama 2 (dua) tahun ke depan. Mengingat mayoritas negara-negara Eropa menolak tekanan Rusia, dan bersiap menghadapi krisis energi dan pangan. Tekanan dimaksud ialah membayar setiap impor dari Rusia dengan menggunakan mata uang Rubel sebagai pengganti Dollar Amerika. Sedangkan untuk Indonesia, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri tentang kemungkinan lonjakan inflasi.

Pada 9 Mei 2022, Presiden Joko Widodo bertolak ke Washington menghadiri KTT ASEAN – US. KTT tersebut akan berlangsung, 12-13 Mei 2022. Dua pemimpin ASEAN tidak menghadiri perhelatan tersebut, yakni Filipina (karena terlalu dekat jadwal pilpres) dan Myanmar (karena tahun lalu melakukan kudeta). Pada tanggal yang sama, di Jakarta berlangsung demo unjuk rasa peringatan Hari Buruh. Mungkin karena presiden sedang berkunjung ke Amerika Serikat, unjuk rasa kali ini tidak ramai dan hanya menolak Undang-undang Omnibuslaw. Pada 14 Mei 2022, Presiden Joko Widodo bertemu Elon Mask, pengusaha Amerika Serikat di Space X ~ yang baru saja melakukan akuisisi terhadap Twitter.

Pada tanggal 17 Mei 2022, sekumpulan petani Kelapa Sawit berunjuk rasa menuntut pemerintah tidak melarang ekspor kelapa sawit yang menyebabkan harga jualnya menjadi rendah. Masih pada 17 Mei 2022, Ustad Abdul Somad (UAS) dilarang masuk Singapura. Melalui media sosialnya, yang bersangkutan mengaku dicekal pemerintah Singapore, tetapi bukan oleh pemerintah Indonesia. Terdapat beberapa alasan menyebabkan UAS dilarang, antara lain ceramahnya bernada provokatif dan menghasut masyarakat berbuat onar. Selain Singapura, banyak negara telah mencegah Ustad Abdul Somad (UAS). Penjelasan mengenai UAS ini dihubungkan dengan keadaan di Singapura sebagai kantong Kapitalisme terbesar di Asia Tenggara.

Pegiat media sosial sekaligus dosen UI, Ade Armando, pada 18 Mei 2022, kembali aktif dengan mengumumkan perlawanannya terhadap tafsir keliru mengenai agama di kanal You Tube. Pada Minggu, 22 Mei 2022, Pemerintah DKI Jakarta membuka kembali Car Free Day (CFD) setelah ditutup sepanjang Pandemi Covid-19. Masyarakat dipersilakan menikmati CFD, tetapi pedagang asongan belum diizinkan sepanjang area CFD. Sedangkan tanggal 23 Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan dibolehkannya (kembali) eksport kelapa sawit sekaligus minyak goreng ke negara lain. Hal itu menyusul protes para petani sawit yang melibatkan hampir 70.000 orang.

Pada 24 Mei 2022, Luhut Panjaitan (Menko Maritim), dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menangani persoalan harga minyak goreng yang tetap melonjak setelah eksport kelapa sawit diijinkan kembali. Pada 4 Juni 2022, jemaah haji Kloter I Embarkasi Soekarno–Hatta dan Embarkasi Juanda Surabaya, diberangkatkan Menteri Agama dan Wakil Presiden RI. Pada hari yang sama, balap Formula E diselenggarakan di Ancol, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta, menyerahkan trofi kepada para juara.

Terhitung mulai Sabtu, 4 Juni 2022, tiket menuju stupa Candi Borobudur, naik dari Rp. 50.000,- menjadi Rp.750.000,-, sedangkan untuk wisman, menjadi \$100,-. Untuk siswa sekolah Rp.5.000,-. Kenaikan diumumkan Menko Maritim, Luhut Panjaitan. Panjaitan juga mengatakan, kenaikan disesuaikan untuk melindungi pelestarian budaya dan peninggalan sejarah setelah ditutup selama 2 tahun. Beberapa tahun lalu, Candi Borobudur merupakan bagian dari 7 Keajaiban Dunia. Tetapi pada 9 Juni 2022, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar

Pranowo, bersama Menko Investasi, Luhut Panjaitan, menyepakati penundaan kenaikan harga menaiki stupa Candi Borobudur.

Masih pada 9 Juni 2022, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuka Jakarta Fair 2022, yang berlangsung hingga 17 Juli 2022. Tetapi pada Senin, 13 Juni 2022, beberapa daerah tercatat mengalami peningkatan kembali terinfeksi Covid-19. Dr. Rhenald Kasali, seorang pakar manajemen organisasi, menjelaskan pada YouTube, kemungkinan Presiden Joko Widodo dan Indonesia dalam bahaya. Disebabkan beberapa kerugian pemerintah asing akibat kebijakan Nasionalisme Indonesia. Pada masa lalu, Nasionalisme berarti keuntungan atas negeri sendiri. Dr. Rhenald Kasali menjelaskan hal itu pada Senin, 13 Juni 2022. Kelesuan Ekonomi global turut membangkitkan sentimen tersebut, ujar Kasali, yang disebabkan perang Rusia vs Ukraina serta krisis energi.

Pada tanggal 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo, melantik Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Menteri Perdagangan, dan Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Tata Ruang/ Agraria (Kepala BPN). Turut pula dilantik 3 (tiga) orang wakil menteri.

Turnamen Piala Presiden melangsungkan pertandingan sepakbola antara Persib dan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung. Tercatat pula 2 (dua) orang suporter Persib Bandung tewas akibat membludaknya penonton memasuki stadion. Masih pada 17 Juni, kebun binatang Bandung dikabarkan memiliki utang sebesar Rupiah 13,5 milyar akibat Pandemi selama 2 (dua) tahun dan masalah lainnya.

Sementara pada 27 Juni 2022, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menutup Holywings, karena melakukan promosi minuman dengan memakai nama Muhammad dan Maria. Hari ini pula langsung dilakukan penyegelan pada 3 (tiga) wilayah Holywings. Lalu pada Kamis, 30 Juni 2022, berlangsung pengesahan 3 Propinsi di Papua: Papua Utara, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Dengan begitu, jumlah propinsi di Indonesia berubah menjadi 37, dari sebelumnya 34 dan 27 (Orde Baru).

Pada 6 Juli 2022, jumlah warga terpapar virus Corona telah mencapai 2743 kasus, usai sehari sebelumnya mencapai 2577 kasus. Sementara di tengah krisis energi global yang makin memuncak, menteri-menteri Luar Negeri G-20 melakukan pertemuan di Denpasar, Bali, pada 8 Juli 2022. Sementara Boris Johnson, PM Inggris dari Partai Konservatif, menyatakan pengunduran diri akibat krisis ketidakpercayaan sebagian besar anggota kabinetnya.

Sebanyak 6 (enam) orang mahasiswa Universitas di Lampung mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi karena memalsukan tanda tangan, pada 15 Juli 2022. Pihak kampus menyebut pemalsuan tersebut masih debatable, dan menjadi pembelajaran di kemudian hari. Sementara pada 16 Juli 2022, penambahan korban terpapar Covid-19 mencapai 4329 orang.

Pada 22 Juli 2022, Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk melakukan peresmian bangunan infrastruktur, termasuk bandara Pulau Komodo. Sementara pada 25 Juli 2022 Presiden Joko Widodo, bertolak ke Asia Timur melakukan kunjungan ke Tiongkok, Jepang dan Korea untuk kepentingan Ekonomi, di tengah ancaman resesi global 2023. Sementara jumlah penyintas Covid-19 di Indonesia telah mencapai 5000an orang.

Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja pada 9 Agustus 2022 ke Kalimantan Barat, juga untuk meresmikan beberapa proyek infrastruktur. Sementara pada 11 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Sukoharjo dan Boyolali untuk menanam kelapa hibrida bersama warga. Pada 20 Agustus 2022 rektor Universitas Negeri Lampung beserta beberapa jajarannya, ditangkap KPK, karena terbukti menerima uang sogokan mahasiswa baru, berkisar antara Rp. 100 Juta – Rp. 350 Juta per orang.

Pada 30 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Papua. Selain membagikan bantuan tunai sebagai antisipasi kenaikan harga BBM, presiden juga meresmikan Pusat Pelatihan Sepakbola (Papua Football Academy) di Jayapura. Tetapi pada Minggu, 4 September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM akibat situasi di Eropa, untuk hampir semua komponen bahan bakar.

Pada 4 November 2022, sekelompok massa berdemonstrasi di depan istana presiden untuk menuntut kenaikan upah 13% dan menolak UU Cipta Kerja (Omnibuslaw). Pada hari yang sama, berlangsung demonstrasi untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Demonstrasi ini disimbolisasi sebagai ‘Gerakan 411’, yang mengingatkan pada ‘Gerakan 212’ untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama.

Akhirnya, pada 15-16 November 2022, Presiden Joko Widodo, resmi membuka KTT G-20 di Denpasar, Bali. Sebanyak 37 pemimpin G-20 datang ke Bali, yang mewakili negara dan badan organisasi dunia. Juga hadir, 17 kepala pemerintahan. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa 2022 merupakan tahun peralihan Ekonomi yang sangat penting. Perubahan dari Pandemi Covid-19 dan pasca Covid-19 ditandai kelesuan dan peralihan dari Ekonomi massal ke Ekonomi Digital. Seperti kata seorang gubernur, “Covid-19 telah menelanjangi kita”. Ungkapan tersebut ada benarnya; seperti apakah manusia Indonesia pasca Pandemi?

2. Kompilasi Peristiwa Ekonomi 2022

Ekonomi adalah Ilmu yang Muram. Setidaknya, begitu kalimat yang pernah diungkapkan David Rikardo dan Nassau Sr., yang dibantah Karl Marx dan Frederich Engels. Namun Marx dan Engels tidak sekalipun membantah bahwa Ilmu Ekonomi bertentangan dengan Sains atau Ilmu Pasti. Bukan soal kepastian, tetapi bagaimana fenomena alam terkait dengan manusia dan diukur sesuai dengan kebutuhan pada manusia.

Berdasarkan uraian panjang di atas, dapat dikatakan bahwa geliat Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 masih mengalami kondisi yang muram. Sektor-sektor riil masih diawasi secara struktural, sedangkan masyarakat masih mengandalkan Ekonomi massal tinimbang Ekonomi digital, justru pada era teknologis ini. Kendati dikatakan Ekonomi tumbuh sebesar 5,3%, tetapi pertumbuhan dimaksud tidak terlalu dirasakan kelas bawah. Seperti diketahui, cara menghitung pertumbuhan Ekonomi paling mudah adalah

$$\Delta PDB_x = \frac{PDB_x - PDB_{x-1}}{PDB_{x-1}} \times 100\%$$

ΔPDB = Laju Pertumbuhan Ekonomi
 X = Tahun tertentu
 $X-1$ = Tahun sebelumnya
 PDB = Produk Domestik Bruto

Penghitungan di atas memang terlalu sederhana, sesederhana menghitung biaya pagelaran Piala Dunia Qatar 2022 yang menelan US\$220 Milyar. Jika berhasil menentukan angka pertumbuhan Ekonomi sebuah Negara, kita dapat mulai mengkalkulasi konsekuensinya pada sektor riil.

Pada masa Orde Baru, angka pertumbuhan sangat penting untuk menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Soeharto, Orde Baru telah mencapai surplus hebat, melampaui apa

yang dilakukan Soekarno. Bahkan pada 1980, pertumbuhan Ekonomi Indonesia telah berhasil mencapai angka 9,9%. Hal ini memenuhi ekspektasi sepanjang dekade 1970an, dengan Trilogi Pembangunan: Pertumbuhan, Stabilitas dan Pemerataan.

Catatan geliat Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 diperoleh dari pemberitaan mass media, khususnya Televisi dan Internet (Google.com). Dengan kata lain, gambaran itu bisa saja tidak mencerminkan sektor riil masyarakat yang lebih luas dan sangat struktural. Tetapi bisa juga dikatakan keadaan Ekonomi Indonesia sebenarnya memang demikian, yakni lebih banyak ditentukan perilaku elit, yang sebagian besar memegang kendali Negara.

Catatan Mirza Adityaswara akhir 2021 menyatakan, meredanya Covid-19 Desember 2021 atau penghujung tahun lalu membawa optimisme pada akselerasi pertumbuhan 2022. Resiko yang menginterupsi pertumbuhan tersebut memang akan muncul, yakni pengetatan moneter di Amerika Serikat, serta komunikasi yang kurang baik dengan Bank Sentral Amerika Serikat.

Menurut Adityaswara, neraca barang dan jasa sepanjang 2021 menuju ke 2022 mencatat surplus meyakinkan, sehingga akan menjaga stabilitas kurs ke depan (2022). Namun catatan itu, pada kenyataan tidak demikian karena menjelang akhir 2022, diketahui gejala Rp telah mencapai angka Rp.15.000., meskipun lonjakannya tidak mengkhawatirkan. Selain itu, juga dikatakan bahwa dari semua hasil transaksi digital (e-Commerce), 72% berasal dari konsumen baru yang tidak berasal dari kota besar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Ekonomi Digital Indonesia setidaknya akan memberi harapan baru pada 2022.

Namun demikian, harus dikatakan bahwa sepanjang 2022, harapan dimaksud masih jauh. Ekonomi Indonesia harus berjibaku atau lebih tergantung pada Ekonomi massal. Terutama setelah Covid-19 sepanjang 2 (dua) tahun, banyak masyarakat Indonesia mengalami kejenuhan sehingga ketika tempat-tempat wisata dibuka kembali, jumlah pengunjung cukup membludak dan Ekonomi Digital sebenarnya telah dikalahkan.

Krisis energi 2022 berimbas pada mahal dan langkanya harga minyak goreng, yang menunjukkan hukum permintaan barang (supply-demand) tidak berlaku lagi. Juga ketika pemerintah menutup keran import minyak goreng, harga semakin melambung yang membuktikan bahwa kondisi di Luar Negeri lebih meyakinkan terhadap pedagang dari situasi domestik. Berbanding terbalik dengan Pertamina yang tidak lagi menyediakan Solar dan Peralite, Petral (Malaysia) justru menstabilkan harga dengan mempertahankan jenis-jenis bahan bakar yang telah bersahabat dengan konsumen di sana.

Kita memahami bahwa mentalitas (psiko-sosial) masyarakat Indonesia sebenarnya tidak siap menghadapi gejolak harga Ekonomi seperti itu karena sekian tahun telah dinabobokkan Orde Baru dalam bentuk subsidi (sejak 1973). Hal ini juga mengingatkan kita pada perbedaan Prinsip Ekonomi dan Tindakan Ekonomi. Prinsip Ekonomi menjelaskan, dengan modal sekecil-kecilnya harus dapat memperoleh profit sebesar-besarnya. Sedang Tindakan Ekonomi adalah memakai seluruh sumber daya yang tersedia untuk memperoleh kebutuhan.

Pada Idul Fitri 2022, lonjakan Covid-19 kembali terjadi akibat kerumunan massal saat merayakan Lebaran. Sekali lagi hal ini membuktikan Ekonomi massal masih mengalahkan pencapaian Ekonomi Digital. Sampai kapan hal itu masih terjadi? Sementara di tengah kondisi Ekonomi yang lesu, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Jika Ekonomi masyarakat tergantung pada perilaku elit, kenaikan terasa sangat memberatkan.

Peringatan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet menyoal import barang yang sebenarnya dapat dibuat di Indonesia, tetapi justru diimport, membuktikan inovasi dan

kemauan masyarakat terhadap produk lokal masih dipertanyakan. Tetapi justru sebaliknya, terdapat 2 (dua) persoalan lain yang juga terkait dengan itu: 1. Manusia Indonesia masih merasa 'lebih nyaman' dengan buatan Luar Negeri, atau 2. Politik Anggaran demi menghabiskan dana tersisa masih menyelimuti. Dalam kasus ini, menjadi ingat bagaimana kebocoran demi kebocoran anggaran terjadi selama Orde Baru, yang membuat uang beredar pada Kelas Bawah semakin ramai tetapi menunjukkan sistem itu sebenarnya tidak sehat.

Senada dengan itu, peringatan Presiden ke V bahwa ibu-ibu lebih suka belanja baju baru tetapi justru mengeluh karena mahalnya minyak goreng, juga perlu mendapat perhatian. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia lebih mengandalkan Rasa tinimbang Rasio. Jadi untuk diajak berpikir ke arah yang lebih rasional tinimbang perasaan, mungkin tidak sanggup atau lambat. Sementara pejabat Negara dinyatakan terlibat mafia perdagangan minyak goreng, apakah penyebabnya? Hal ini bukan soal remunerasi yang kurang atau tidak meyakinkan, tetapi pada aspek mentalitas. Dan jika kita bicara soal mentalitas, catatan ini berpihak pada kenyataan bahwa mentalitas pejabat sebenarnya berasal dari mentalitas masyarakat juga. Pejabat yang korup pasti berasal dari masyarakat yang korup, dan bukan sebaliknya.

Sebagai akibat mahalnya harga minyak goreng dan pencopotan jabatan, Presiden Joko Widodo melantik menteri Perdagangan yang baru (dari Partai Politik), dan Menteri Agraria (mantan Panglima TNI). Pelantikan pejabat baru seperti ini selalu menimbulkan harapan baru, tetapi kita menunggu apakah harapan baru itu dapat terwujud dengan baik atau tidak. Sebagai PR (Pekerjaan Rumah) baru, menteri Perdagangan langsung menghadapi tuntutan petani kelapa sawit yang melakukan demonstrasi agar harga CPO (minyak kelapa sawit mentah) dinaikkan. Juga menjelang Agustus 2022, banyak warga berdemo mengenai Omnibuslaw disertai kekerasan terhadap pegiat media sosial yang juga dosen universitas negeri. Tanggapan-tanggapan kritis sang pegiat medsos memang cenderung tidak disukai masyarakat, khususnya yang beragama secara fanatik. Seperti telah dikatakan, masyarakat lebih banyak menggunakan perasaan tinimbang akal atau Rasionalitas.

Diizinkannya Car Free Day di Jakarta dan beberapa kota besar menunjukkan bahwa pemerintah sudah menganggap Covid-19 tidak lagi berbahaya. Namun, para pedagang asongan dan mereka yang meraup rejeki dari Car Free Day masih dilarang berjualan di sekitar jalan yang dilalui massa. Hal ini membuktikan, pada tingkat wilayah pun, Ekonomi Kelas Bawah masih bergantung pada kemauan Kelas Atas, atau juga perilaku Middle Class.

Terkait penolakan Omnibuslaw, sebagian anggota masyarakat menyadari Undang-undang ini membuka keran Globalisasi lebih luas ke Indonesia, tetapi masyarakat sebenarnya belum siap. Penolakan demi penolakan terjadi di mana-mana, termasuk oleh mereka yang terang-terangan menyatakan tidak siap, seperti buruh dan para pekerja harian. Tetapi jika tenaga kesehatan juga ikut berdemo dan menolak, apakah alasan tuntutanannya? Pada konteks ini kita berbicara secara Sosiologis, dan juga harus membuktikan bahwa manusia Indonesia sebenarnya masih kolektif, tetapi merasa bebas secara individual.

Ihwal 'Penjahat Demokrasi' yang dikemukakan pegiat LSM, tentu dapat dipertanyakan secara kritis. Demokrasi yang mana? Bukankah Demokrasi kita juga keteteran? Pada tahun 1957, Soekarno bahkan menyerukan, "Wahai Indonesia, cari sendiri Demokrasi yang cocok buatmu!". Dengan kata lain, apabila LSM yang berseru itu tidak dapat menjelaskan Demokrasi dalam konteks Indonesia, penyeru sebenarnya tidak memenuhi indikator atas tuduhannya. Atau jika Demokrasi yang dimaksud adalah 'Demokrasi Ekonomi', maka harus

dijelaskan atas dasar apakah tuduhan tersebut dilontarkan. Apakah ‘penjahat’ memang konruen dengan istilah Demokrasi?

Akhirnya, catatan ini harus memberi penilaian terhadap transformasi Teknologi, khususnya sebagai hasil KTT G-20 yang telah berlangsung di Bali, pada November 2022. Dan jika transformasi Teknologi sebagai pencapaiannya, saya ingat bahwa sejak dekade 1970an (bahkan 1950an), transfer Teknologi telah digaungkan ketika Negara mengizinkan pemodal asing akan menanamkan modal di Indonesia. Apakah transfer sama dengan transformasi? Berdasarkan bobot Teknologi dimaksud, kedua hal itu sebenarnya berbeda. Tetapi sebelum berbicara Transformasi, apakah Indonesia telah berhasil secara meyakinkan melakukan transfer Teknologi?

Sebagai Negara tetangga, Malaysia mengenal Indonesia sebagai Negara yang banyak melakukan ‘eksport’ tenaga kerja biaya murah, tetapi termasuk berbiaya tinggi di Indonesia. Hal itu membuktikan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sebetulnya cukup rendah, terutama dibandingkan Negara tetangga (Malaysia, Singapore dan Taiwan). Apalagi kalau berbicara mengenai kapasitas Teknologi, yang tentunya belum meyakinkan. Karena itu, ketika KTT G-20 berlangsung, menjadi ironi ketika tayangan TV Analog berpindah seluruhnya menjadi TV Digital, karena tidak semua anggota masyarakat siap dengan perpindahan itu.

Harus dikatakan, kondisi Ekonomi Indonesia sebenarnya tidak seperti digaungkan pada tingkat teoritis. Selain soal mentalitas (Psiko-Sosial), realitas Ekonomi kita masih terlalu jauh dari Inovasi, Produktivitas, apalagi secara kemampuan Teknologis. Sepanjang 2022 ini, catatan saya tidak terkait sama dengan persoalan-persoalan itu. Tetapi yang lebih penting, setidaknya hingga 5 (lima) – 8 (delapan) tahun ke depan, situasi Ekonomi masih ditentukan oleh gejolak Covid-19. Kita harus bersiap menghadapi tekanan terburuk, atau Ekonomi harus dipengaruhi oleh sebuah Ideologi baru yang meyakinkan.

3. Geliat Politik 2022

Seperti pada catatan Ekonomi, saya menyiapkan data catatan Politik sejak Bulan Desember 2021. Catatan ini tidak bersifat ‘murni politik’, tetapi semua yang terkait dengannya bagian dari spektrum Politik. Demikian catatan saya:

Sejak 2016, setiap 2 Desember lapangan parkir Monas Jakarta dihiasi demonstrasi massa dari berbagai sudut kota. Peristiwa itu mengingatkan pada kekalahan Basuki Tjahaja Purnama dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI. Tetapi tahun ini, aksi yang menyebut diri Perhimpunan Alumni (PA) 212, tidak diizinkan Anies Baswedan sebagai gubernur, yang pada 2022 akan mengakhiri jabatan.

Tetapi pada bulan yang sama terjadi pembatalan UU (Undang-undang) No. 11/ 2021 Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dilakukan Majelis Konstitusi (MK). Disambut gembira para buruh dan anggota-anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyebut UU tersebut ‘Cilaka’ (Cipta Lapangan Kerja). Hal itu menunjukkan sebagian besar anggota partai tersebut tidak setuju UU tersebut, kendati pemerintah sudah menjelaskan maksud dan tujuannya. Majelis Konstitusi meminta pemerintah melakukan revisi UU tersebut dalam waktu 2 tahun.

Pada pembukaan Muktamar NU di Lampung, Presiden Joko Widodo menegaskan Nahdlatul Ulama memiliki modal sosial dan sekaligus religius yang baik. Pada muktamar, KH. Yahya Staquf terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah yang baru, menggantikan KH. Said Aqil Siradj. Gus Yahya, dalam pidato keterpilihannya menegaskan, bahwa dia akan membawa NU kembali ke jalur pemikiran Abdurrahman Wahid, yakni Indonesia yang pluralis dan toleransi.

Masih pada akhir 2021, Plt. Ketum PSI, Giring Nidji mengingatkan agar Indonesia

tidak memilih presiden pembohong dan Anti-Toleransi. Publik juga mengetahui komedian Mongol Stress (Roni Immanuel) ternyata telah menjadi anggota PSI. Seorang lagi artis/ stand up comedian menjadi politisi. Sementara waketum Gerindra menegaskan rakyat mempunyai hak pilih terbuka. Giring Nidji mengingatkan bahwa rakyat Indonesia memang pelupa.

Memasuki Tahun Baru 2022, Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak lagi membatasi rakyat Indonesia, tetapi varian Omicron tetap harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius. Pada 24 Februari 2022, Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina yang hendak menjadi anggota NATO (Fakta Pertahanan Atlantik Utara). Presiden Vladimir Putin tidak menghendaki keinginan tersebut. Secara sempit, peperangan ini dilihat sebagai intervensi terhadap kedaulatan Negara lain. Juga sebagai upaya mengembalikan bekas negara-negara Uni Sovyet ke pangkuan Rusia. Namun secara luas, perang ini dilihat sebagai upaya Rusia memutus hegemoni Barat terhadap Timur yang diperlakukan tidak adil melalui berbagai sanksi. Beberapa Negara yang mendukung Rusia ialah Tiongkok, Venezuela, Korea Utara, India, Iran dan Syria. Sedangkan Indonesia memilih abstain dalam pemungutan suara yang dilakukan komisi HAM-PBB.

Demonstrasi besar terjadi pada 11 April 2022. Utamanya, demonstrasi itu dilakukan mahasiswa (Badan Eksekutif) yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sedari awal, gagasan tentang perpanjangan masa jabatan datang dari 3 (tiga) orang menteri, yang menjelaskan Indonesia saat ini sedang mengalami masa sulit, sekaligus pada tahap awal untuk pulih. Jika jabatan presiden diperpanjang, atau menunda Pemilu 14 Februari 2024, maka Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana trilyunan rupiah untuk menyelenggarakan kontestasi. Banyak pihak menolak usul tersebut, melalui media maupun secara langsung.

Pada 15 April 2022, bertepatan dengan Jumat Agung, Menko Polhukam menyatakan mesin scanner PeduliLindungi tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi justru sebaliknya: melindungi masyarakat. Pernyataan itu dikemukakan sebagai counter pada Amerika Serikat yang mengkritisi PeduliLindungi. Dalam perspektif Amerika Serikat, PeduliLindungi dianggap melanggar HAM karena melanggar privacy, tetapi upaya tersebut menunjukkan bahwa negara adi daya sedang “mengamati” Indonesia terkait keberpihakan RI pada Rusia dan Tiongkok. Menko Polhukam menyatakan, upaya mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia lebih baik tinimbang di Amerika Serikat. Lagi pula, secara ideologis, Amerika Serikat memang berbeda dari Indonesia. Di sana manusia dihargai secara individual, sedangkan di Indonesia manusia dilihat secara kolektif.

Setelah videonya tersebar lewat WhatsApp, pada 17 April 2022 istri prajurit KY 117 Banda Aceh memohon maaf pada presiden, Panglima TNI dan Ketua Persit serta seluruh netizen, dengan mengatakan bahwa video tersebut hanya mencontoh dan spontan, dan tidak bermaksud menyindir. Sedangkan 19 April 2022, mantan anggota Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, divonis 5 bulan penjara atas tuduhan penistaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan itu lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa. Bagi sebagian pihak, penistaan agama yang disangkakan pada Ferdinand Hutahaean sebenarnya relatif, tetapi atas desakan massa tertentu kasus tersebut harus disidangkan.

Pada 30 April 2022, Presiden Joko Widodo menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Joko Widodo mengharapkan kedua pimpinan Negara dapat segera berdamai. Kepada Zelensky, Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak dapat memberi bantuan persenjataan karena hal itu dapat merusak prinsip kebijakan Politik

Luar Negeri dan hanya dapat memberi bantuan kemanusiaan. Sedangkan terhadap Presiden Putin, Joko Widodo hanya memastikan kedatangannya ke Bali pada perhelatan KTT G-20.

Pada 24 Mei 2022, Luhut Panjaitan (Menko Maritim), dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menangani persoalan harga minyak goreng yang tetap melonjak setelah ekspor kelapa sawit diijinkan kembali. Lalu tanggal 1 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, yang dilangsungkan di Ende.

Pada 2 Juni 2022, konvoi Khilafatul Muslimin berlangsung serentak di Jawa Barat. Seruan konvoi tersebut ialah 'Kebangkitan Khilafah'. Konvoi sebelumnya berlangsung di Lampung pada 2016. Masih pada tanggal yang sama, dilangsungkan parade Angkatan Udara Inggris untuk memperingati 70 Tahun tahta Ratu Elizabeth II. Beliau berkuasa sejak 1952, sedangkan Ratu Elizabeth II, tahun ini berusia 96 years old. Beliau lahir pada 1926.

Bertepatan Ulang Tahun Presiden Joko Widodo, dilangsungkan pembukaan Rakernas (21-23 Juni 2022) PDIP di Jakarta. Dalam pidato pembukaan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan beberapa gagasan, termasuk kedaulatan petani untuk kekuatan pangan Indonesia. Bersamaan itu, berlangsung Rapimnas PKS (Partai Keadilan Sejahtera), 21-22 Juni 2022.

Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera), menemui ketua umum NasDem (Nasional – Demokrat) di Gondangdia (Jakarta Pusat), untuk membicarakan koalisi partai, karena PKS hendak membentuk Poros Baru di luar KIB (Koalisi Indonesia Baru) yang sudah terbentuk. Juga sebelumnya, NasDem telah mengumumkan 3 (tiga) calon presiden dari NasDem, yakni Anies Baswedan, Gandjar Pranowo dan Andika Perkasa. Pertemuan itu berlangsung tertutup, 22 Juni 2022. Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), menemui ketua umum NasDem (Nasional Demokrat), di Gondangdia (Jakarta Pusat). Pertemuan juga berlangsung tertutup, 23 Juni 2022.

Ketua Umum Partai Demokrat, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), menemui ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung tertutup. Sekretaris Jenderal NasDem menjelaskan, komunikasi Politik dengan PDIP sedang dijajaki, sehubungan dengan Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presiden dari Partai NasDem. Sabtu, 25 Juni 2022, diresmikan Jakarta International Stadium oleh Gubernur Anies Baswedan.

Kamis, 30 Juni 2022, berlangsung pengesahan 3 Propinsi di Papua: Papua Utara, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Dengan begitu, jumlah propinsi di Indonesia berubah menjadi 37, dari sebelumnya 34 dan 27 (Orde Baru). Satu propinsi lagi, yakni Papua Barat Daya, masih menunggu pengesahan, yang akan dilangsungkan akhir tahun ini.

Pada 19 Juli 2022, Presiden Republik Timor Leste, Jose Ramos Horta, melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta. Dan pada 22 Juli 2022, Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk melakukan beberapa peresmian bendungan infrastruktur, termasuk bandara di Pulau Komodo.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, 9 Agustus 2022, ke Kalimantan Barat, juga untuk meresmikan beberapa proyek infrastruktur. Sedangkan Kepala kepolisian RI (Kapolri), mengumumkan penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, bersama 3 (tiga) orang tersangka lain. Pengumuman itu terjadi 9 Agustus 2022, sekaligus mengumumkan penetapan 31 orang diperiksa di Mako Brimob. Lalu pada 11 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sukoharjo dan Boyolali untuk menanam kelapa hibrida bersama warga.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi

III, khususnya ihwal kasus terbunuhnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah Komisaris Jenderal Ferdy Sambo. RDP diadakan 24 Agustus 2022, setelah sehari sebelumnya mendengarkan penuturan Komnas HAM dan Kopolnas. Lalu, bertempat di depan Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo melepas kirab Merah Putih didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Habib Lutfi bin Yahya. Kegiatan ini berlangsung Minggu, 28 Agustus 2022.

Senin, 5 September 2022, Ketua PDIP Puan Maharani, bertemu Prabowo Subianto di Hambalang. Pertemuan dilanjutkan dengan menunggang kuda bersama. Masih pada hari yang sama, beberapa komponen buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi atas kenaikan harga BBM. Menjadi fenomena pula, pembebasan para koruptor seperti Ratu Atut dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pada Jumat, 9 September 2022 (8 September waktu Inggris Raya), Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun. Naik tahta pada 1953, Elizabeth II telah mendampingi 15 orang PM, sejak Winston Churchill hingga Elizabeth Truss. Sidang banding Kode Etik Polri memutuskan menolak banding Irjen. Pol. Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sehingga yang bersangkutan tetap diberhentikan dengan tidak hormat.

Pada 8 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan FIFA tidak ‘menghukum’ Indonesia terkait kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, tetapi akan membantu Indonesia memperbaiki sistem dan regulasi sepakbola nasional. Pada kesempatan lain pada tanggal yang sama, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ke V, Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor. Ketua DPR RI, Puan Maharani bertemu Ketua Umum Golkar, Erlangga Soetjipto. Kedua pertemuan itu menunjukkan langkah Politik PDIP menjelang penentuan bakal calon presiden pada tahun 2024.

Bertempat di Bandung (Lembaga Eijkman), Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin Covid 19 buatan Indonesia yang diberi nama Covindo Vaksin. Ini berlangsung pada 18 Oktober 2022. Pada 17 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri (Jend. Pol. Tito Karnavian) melantik Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

Pada 4 November 2022, sekelompok massa berdemonstrasi di depan Istana Presiden, menuntut kenaikan upah 13% dan menolak Undang-undang Cipta Kerja. Menjelang KTT G-20 di Bali, Presiden Joko Widodo, menelepon Presiden Rusia dan Presiden Ukraina sebagai upaya mengingatkan memperkuat ketahanan pangan. Percakapan ini berlangsung pada 5 November 2022.

Pada 15-16 November 2022 diselenggarakan KTT G-20 di Denpasar, Bali. Indonesia menuai pujian atas sukses penyelenggaraan ini. Tetapi kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin dibatalkan atas pertimbangan keamanan. Sedangkan pada 20 November 2022, Qatar menjadi tempat penyelenggaraan World Cup 2022. Jadi, apakah yang bisa dikatakan tentang Politik Indonesia sepanjang tahun 2022? Berikut saya akan mencoba menelusuri secara konseptual (termasuk Sejarah) yang dapat membantu memahami persoalan di atas.

4. Kompilasi Peristiwa Politik 2022

Sejak 1945, Indonesia merupakan kenyataan baru yang diisi oleh kondisi-kondisi yang sebelumnya telah tersedia. Dari Kolonialisme ke Kemerdekaan, Soekarno tidak memiliki kesempatan mengubah realitas Indonesia merdeka. Hal itu membuat kita selalu mengingat dan mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa Politik dan Kolonialisme Belanda pada dasarnya

didasari oleh kondisi-kondisi Sosial dan Psiko-Sosial yang sama.

Indonesia adalah Negara berideologi Pancasila. Namun setelah 77 tahun, Ideologi hanya semboyan formal belaka yang dipercakapkan di ruang-ruang kelas kampus, namun hampir sulit diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Sementara Politik adalah seni kemungkinan mencapai tujuan bersama secara kolektif. Kita dapat membagi analisa Politik menurut David Apter ke dalam: Tingkah laku atau Behavioralis (Kebiasaan), Strukturalis (Negara) dan Developmentalis (bagaimana Negara mempengaruhi keadaan Sosial). Catatan tentang kedua hal ini (Ideologi maupun Politik), sengaja menjadi pembuka kompilasi ini karena Politik tanpa Ideologi akan terasa hambar, sementara Ideologi tanpa Politik menjadi menjengkelkan, dan hanya omong kosong.

Masyarakat Indonesia dibagi atas 3 (tiga) kelas: Kelas Atas (elit), Middle Class yang tidak meyakinkan, dan Kelas Bawah yang berusaha melakukan mobilisasi vertikal dalam bidang Ekonomi. Dalam kondisi demikian, Politik Indonesia saat ini adalah Politik seperti yang ditemukan Soekarno 1926. Menurut Soekarno, lapis-lapis sosial Hindia Belanda terdiri dari Kelompok Nasionalis, Kelompok Agamis, dan Kelompok Sosialis atau Komunis.

Seperi diketahui, pada 14 Februari 2024 mendatang, Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum, yang diikuti 17 partai politik dan 6 partai lokal (Aceh). Pemilihan Umum tersebut sekaligus memilih presiden dan wakil presiden yang baru, setelah Joko Widodo memimpin 10 tahun. Selama setahun (lebih) menjelang pemilihan umum, situasi Politik Indonesia mulai mengarah pada perubahan itu, dengan hiruk pikuk yang ditingkahi berbagai siasat. Berbagai kelompok sosial di Indonesia menikmati hiruk pikuk tersebut, tetapi kelas-kelas Sosial Indonesia yang telah disebutkan di atas masih belum menunjukkan riak-riak yang membuat khawatir pemerintah.

Setelah 2021 dan memasuki 2022, Politik Indonesia disibukkan penolakan terhadap UU Omnibuslaw. Undang-undang tersebut bukan hanya bersifat Ekonomi, tetapi juga Politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama Partai Keadilan Sosial, melihat UU Omnibuslaw tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum memiliki capability terhadap teknologi. Secara ideologis, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan kata lain, amanat Pancasila tidak tampak dalam Undang-undang tersebut, tetapi lebih banyak menuntut penyesuaian atas Globalisasi. Hal ini menunjukkan buah simalakama dalam konteks perkembangan situasi, apakah Indonesia akan bertahan atau berubah?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri selama ini banyak mendukung gerakan yang berlawanan dengan Pancasila, seperti khilafah dan hukum syariat. Karena itu penolakan PKS terhadap Omnibuslaw dilihat sebagai Politik Dua Kaki. Dan bagi banyak kelompok Sosial, perubahan sikap terhadap Globalisasi memang tidak dapat dielakkan. Runtuhnya Ideologi Komunisme sejak 1989 menjadi taruhannya, baik sisa kekuasaan Orde Baru (1992-1998), maupun pada periode Reformasi hingga sekarang. Apakah yang telah dilakukan selama kurun waktu itu?

Terpilihnya KH. Yahya Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dapat dianggap sebagai 'angin segar' bagi Islam Politik di Indonesia. Beliau menyatakan akan menarik kembali gerbong pemikiran Islam KH. Abdurrahman Wahid yang toleran - pluralis. Sejak 1992, Politik Indonesia memang dijejali politik identitas (Agama) yang membuat Bhinneka Tunggal Ika menjadi slogan tanpa makna. Kondisi ini telah dimanfaatkan berbagai pihak yang melihat Islam sebagai kekuatan Politik massal secara kuantitatif, tetapi bukan kualitatif.

Termasuk saat menghadapi kemungkinan Perang Dunia III sebagai akibat serangan Rusia ke Ukraina pada tahun ini. Serangan itu merupakan upaya sengaja meredam Politik agresif Amerika Serikat terhadap Eropa secara khusus dan dunia Internasional secara umum. Juga ketika pengakuan atas Indonesia menyeruak secara Internasional, tetapi justru dianggap nyeleneh di Dalam Negeri. Para pengkritik yang tidak bisa melihat kenyataan secara obyektif, menjadi situasi Politik yang menonjol pada 2022.

Penolakan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hanya muncul dari massa tetapi juga presiden sendiri. Kepercayaan publik, atau ketidakpercayaan, telah menjadi kebiasaan yang tertanam sejak Orde Baru dan masih akan berlanjut sebelum ada kekuasaan tegas dihadapan masyarakat seperti otoritarianisme Jenderal Soeharto. Misalnya pada saat penggunaan helm ketika menaiki kendaraan sepeda motor pada 1984. Setelah mendengar masukan dari lembaga dinas rahasia, Soeharto tidak menunda penerapan penggunaan helm tersebut.

PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 3-4 telah berlalu. Namun masyarakat diminta tidak lengah dan tetap menjaga diri. Apalagi jika kegiatan Politik massal tidak dapat dihindari, seperti diingatkan pimpinan Partai Solidaritas Indonesia, supaya kritis atas Politik uang dan Politik lupa ingatan. Kondisi serupa banyak terjadi pada masa lalu, terutama sepanjang Orde Baru, dengan cara menghamburkan uang pada khalayak, atau memilih orang yang pernah tersandung kasus (apapun, termasuk korupsi).

Hidup memang terus berjalan dan perubahan dinamis tidak dapat dielakkan. Tetapi untuk konteks Indonesia, menurut catatan ini kehidupan banyak orang tanpa Ideologi akan membentuk manusia-manusia zombie yang hidup tanpa arah, tujuan dan aturan yang jelas. Komunikasi Politik tentu dapat berlangsung dengan siapa saja, pada level manapun. Tetapi komunikasi Politik yang dilakukan bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan atau menetapkan jabatan pemerintahan. Kelas bawah juga bisa melakukan komunikasi Politik, sejauh wacana yang diperbincangkan berguna secara Sosial untuk masyarakat luas. Pada konteks inilah dikenal apa yang disebut Civil Society, suatu komunitas a-politis yang sebenarnya bersifat Politik minus Negara.

Pada Bulan November 2022, kegiatan Politik pemerintah terfokus pada KTT G-20 yang diselenggarakan di Bali. Selain itu, pemerintah juga terfokus pada penyelesaian jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), bekerja-sama dengan Tiongkok. Dan terakhir, harus terkonsentrasi persiapan Pemilu 2024.

Berdasarkan konsentrasi tersebut, fokus pada G-20 menjadi tanggung jawab Negara untuk merealisasikan. Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menghimpun Pandemic Fund dengan setoran awal US\$50 Juta, meski dikhawatirkan dana sebesar itu lebih banyak tersedot untuk Negara-negara Asia Barat, seperti Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan (yang saat ini dikuasai pemerintahan Islam radikal). Konsentrasi kedua, seperti diingatkan seorang guru besar UNPAD agar proyek KCJB tidak terbentur apa yang disebut De-developmentasi. Istilah ini merujuk pada pengertian pembangunan yang belum bisa mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga harus dibangun dan direncanakan kembali.

Sedangkan pada konsentrasi ketiga, salah satu isu pokok yang menonjol adalah banyaknya pengurus teras PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang keluar dari Partai itu, sementara Pemilu semakin dekat. Beberapa pihak menyebut partai besutan anak-anak muda ini terlalu idealis dengan memainkan isu-isu yang menantang arus seperti anti Politik Identitas,

serta mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan gubernur DKI (2017). Tetapi isu tersebut, justru kontra-produktif dengan sistem kekuasaan di Indonesia, atau tidak sejalan dengan kondisi Politik Makro Indonesia.

Terkait isu tersebut, catatan ini berpendapat PSI harus mempertahankan idealisme yang diusung untuk pencerdasan Politik meski harus menanggung sejumlah resiko. Apa yang terjadi pada Partai NasDem dapat menjadi contoh, yang telah mendeklarasikan bakal calon presiden (Anies Baswedan), bahkan sebelum tanggal 10 November 2022. Jumlah suara partai itu terus merosot dan berpotensi ditinggal konstituen. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada PSI dan Partai NasDem merupakan 2 (dua) hal yang berbeda.

5. Sintesa Ekonomi - Politik Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, berikut disajikan tabel sederhana sebagai perbedaan antara sintesa Ekonomi dan sintesa Politik Indonesia.

Ekonomi Indonesia 2022	Politik Indonesia 2022
Menghapus beberapa jenis bahan bakar	Protes terhadap UU <i>Omnibuslaw</i>
Pertumbuhan Ekonomi secara teoritis tidak diikuti sektor riil	Terkonsentrasi pada peralihan kekuasaan 2024
Peralihan dari Ekonomi massal menuju Ekonomi Digital	Transformasi Teknologi, seharusnya menjadi perhatian semua elemen sosial?
Kemampuan Teknologis masyarakat masih sangat rendah	Perhatian ideologis beralih pada Pragmatisme (material dan uang).
Inovasi dan Produktivitas masih redah	Politik uang dan lupa <i>track record</i>

Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa irisan antara Ekonomi dan Politik Indonesia 2022 dapat disederhanakan dengan ujaran ‘business as usually’ atau urusan seperti biasanya. Dikatakan demikian karena sepanjang 2022, Ekonomi – Politik Indonesia belum beranjak dari kondisi makro maupun mikro yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sejak Covid-19 berangsur mereda, Ekonomi dan Politik Indonesia terbiasa oleh sifat-sifat masyarakat itu sendiri, juga perilaku elit yang sulit berubah.

Secara Ekonomi-Politik, penghapusan bahan bakar Peralite dan Pertamina tampak sulit diterima masyarakat luas, termasuk alasan supaya lebih ramah lingkungan. Alasan ini mempengaruhi cara berpikir manusia Indonesia yang sebagian besar menganut Monoteisme, bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. Manusia merupakan tumpuan kehidupan, sehingga memperhitungkan alam merupakan realitas sekunder. Dan sebaliknya, penolakan terhadap UU Omnibuslaw dianggap bertentangan dengan kepentingan orang banyak, karena manusia Indonesia sebetulnya belum siap memasuki Globalisasi.

Peralihan Ekonomi massal menuju Ekonomi Digital adalah bagi dari perencanaan yang tidak berpihak pada Ekonomi masyarakat kebanyakan. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya orang miskin, terutama karena sulitnya mendefinisikan keadilan dalam masyarakat seperti di Indonesia. Tetapi kemiskinan bukanlah kesengajaan, secara khusus bila ditelisik berdasarkan pertumbuhan manusia (natalitas) dan realitas struktur masyarakat. Kemiskinan bisa dikenali melalui tiga teori, yakni kemiskinan psikologis, kemiskinan psiko-sosial, serta kemiskinan struktural. Pada masa Orde Baru, kemiskinan struktural sangat menonjol, tetapi bukan berarti kemiskinan sosial dan kemiskinan psiko-sosial tidak terjadi akibat kebijakan Negara. Dan setelah Reformasi, kemiskinan struktural coba dihapuskan, namun kemiskinan psikologis dan kemiskinan psiko-sosial justru meningkat.

Pertanyaan “Mengapa demikian?” tidak relevan lagi, karena telah menjadi kondisi

tidak terelakkan manusia Indonesia. Itulah sebabnya, catatan ini juga menggaris-bawahi kemampuan teknologis masyarakat, sehingga peralihan Ekonomi massal menjadi Ekonomi Digital menjadi sangat lambat, bahkan stagnan.

Dan terakhir, karena inovasi dan produktivitas yang masih rendah. Catatan ini tidak hendak mengatakan bahwa sebaiknya produktivitas masyarakat Indonesia sama tinggi dengan manusia di Eropa. Tetapi produktivitas yang rendah bersumber dari banyak faktor. Terutama akibat yang lebih jauh dari tanam paksa (1830-1870). Dengan kata lain, genetika atau turunan, setidaknya menurut catatan ini, cukup dominan. Kita akan membahas soal itu pada lain waktu dan kesempatan, tetapi catatan ini tidak bermaksud mencari kambing hitam atas kegagalan sosial masyarakat atas inovasi dan produktivitas.

Selaras dengan itu pada bidang Politik, irisan yang sejajar dengan itu dapat ditemukan dalam protes terhadap Omnibuslaw yang kian meningkat. Bagi kelas menengah ke atas, dapat dipahami mengapa protes itu semakin tajam, termasuk para tenaga kesehatan. Tetapi pada masyarakat kelas Bawah, hal itu sebenarnya sulit dipahami. Pertama karena tidak membiasakan diri berpikir kompleks, yang kedua karena Covid-19 sesungguhnya belum tuntas.

Transformasi Digital, seperti digaungkan pada KTT G-20 di Bali, sebenarnya belum dapat diikuti oleh segenap elemen masyarakat. Tetapi, cepat atau lambat, transformasi itu memang tidak dapat dielakkan. Siap atau tidak, anggota masyarakat harus dituntut untuk siap dan berubah, termasuk mengikuti perubahan kondisi Ekonomi Digital. Apakah masyarakat akan mampu?

Sejak 1973, kendali Ekonomi negara ini tidak lagi berada di tangan Ideologi Pancasila yang diimplementasikan melalui Nilai-nilai. Catatan ini secara tegas menyatakan Pancasila telah berubah menjadi Ekonomi pragmatis, kalau bukannya individual. Karena itu, bila kita memperhatikan kecenderungan masyarakat, Nilai-nilai yang dibicarakan dan dipersoalkan bukan lagi Pancasila. Apalagi ditingkahi perilaku elit yang jauh dari Pancasila. Mulai dari soal mendasar, yakni korupsi, hingga soal yang lahir sebagai konsekuensi global, Oligarki dan juga aksi bela Agama.

Catatan ini tidak hendak pula mengatakan bahwa beragama merupakan sesuatu yang berlebihan. Tetapi beragama merupakan salah satu wujud Pancasila, Sila Pertama yang telah menyepakati bangsa ini percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kaitan dengan soal Ekonomi dan Politik, tentu saja harus dikatakan bahwa manusia membutuhkan kesejahteraan lebih dari apapun. Tetapi jika manusia lebih mementingkan Agama, sementara kesejahteraan tidak lebih sejajar dengan keyakinan, situasinya akan menciptakan fanatisme berlebihan.

Sementara di lain pihak, harus dikatakan Agama dan Politik sebenarnya beriringan sekaligus terpisah. Di Eropa, pemisahan Agama dan Politik pada Negara telah terjadi sejak abad XV, sedangkan di Indonesia keadaan sebenarnya terpisah, tetapi keduanya terhubung melalui koordinasi Departemen Agama. Istilah 'koordinasi' inilah yang akhirnya melahirkan ambiguitas, apalagi keduanya selalu melibatkan massa beragama sekaligus juga berpolitik. Sedangkan kalau berbicara Oligarki, sulit mengatakan 'tidak' pada Indonesia, khususnya sejak periode pemerintahan Presiden ke VI. Apalagi pada masa sekarang, jika berkaca dari Politik di Filipina, kemenangan Presiden Marcos sering dikatakan konsekuensi dari Politik massal yang memanfaatkan Teknologi.

Demokrasi yang terimplementasi sekarang merupakan "Demokrasi di ujung jari" yang tidak berkualitas, tetapi masih memenuhi jumlah yang diisyaratkan ketentuan Demokrasi itu

sendiri. Lantas, apakah dalam Ekonomi dan Politik Demokrasi ideal masih bersemayam? Lagi pula, siapakah manusia Indonesia yang selalu mengartikan kualitas? Saya tidak terlalu yakin masa depannya, tetapi kita masih bisa menunggunya sembari Wait and See.

KESIMPULAN

Tahun 2022 disambut krisis energi dan krisis Politik yang melanda Dunia Internasional. Ini menandakan bahwa persoalan Ekonomi dan Politik sebenarnya menyatu, bahkan sejak lama. Kesatuan Ekonomi dan Politik juga merembes ke Indonesia dalam banyak sektor, yang memungkinkan kita harus berbicara lintas sektor secara berkelindan, dan tidak menempatkan persoalan demi persoalan seolah segmentatif dan mandiri.

Uraian di atas telah disentaskan dalam setidaknya 5 (lima) poin yang saling ber-irisan. Beberapa jenis bahan bakar telah dihapus dan tinggal kenangan (khususnya bagi yang lahir minimal dekade 1970an), dan masyarakat melakukan protes keras terhadap Undang-undang Omnibuslaw yang tak dapat diantisipasi, khususnya terkait kinerja dan produktivitas manusia. Tetapi selain hal tersebut, kemungkinan Perang Dunia III dan Perubahan Iklim yang mengundang kondisi ekstrem juga tidak dapat dianggap remeh, terutama dampaknya pada Ekonomi global maupun di tingkat Negara.

Ketergantungan banyak negara terhadap negara lain telah menimbulkan dependensi, yang menghasilkan kerjasama Internasional. Tetapi tidak dapat dipungkiri, hal itu juga menciptakan dominasi tertentu, dan istilah 'kekuatan' suatu negara menjelma menjadi siasat atau strategi yang halus namun mematikan. Di pihak lain, kemerdekaan atau kemandirian tidak dapat menghasilkan suatu kemandirian yang benar-benar otonom, karena globalisasi telah menjadi suatu jaringan yang mengikat setiap negara.

Dalam konteks itulah seharusnya kita melihat posisi Indonesia secara Ekonomi dan Politik, baik Nasional maupun Internasional. Catatan ini tidak mengasumsikan perang Rusia dan Ukraina tidak sekadar intervensi kedaulatan sebuah negara pada era Teknologis-Global. Tetapi persoalannya mungkin lebih dari itu, supaya sebuah negara tidak mudah mengajak negara lain mengenakan sanksi atas negara lain. Dan khususnya lagi, Kapitalisme tidak menjadi Ideologi yang mengebiri kemanusiaan lebih luas. Sedangkan untuk Indonesia, pada gilirannya, inilah saat untuk membuktikan kekuatan diri sendiri, terutama sumber daya Ekonomi-Politik untuk sebuah produktivitas yang meyakinkan, justru sebelum kita mencapai usia 100 tahun, sebagai sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mirza Adityaswara, "Catatan Akhir Tahun Tentang Tekfin" dalam KOMPAS edisi 14 Desember 2021.
- Robertus Robert (2019), "Demokrasi Di Tengah Pandemi" dalam TEMPO edisi 22-27 April 2019.
- Apter, David (1996), Pengantar Analisa Politik (Jakarta: LP3ES).
- Dahl, Robert (1992), Demokrasi Ekonomi (Jakarta: Buku Obor).
- Darmanto, Jatman (1992), Kelas Menengah Indonesia (Yogyakarta: Bentang).
- Dewi, Saras (2015), Ekofenomenologi: Mengurai Disekilibrium Relasi Manusia dengan Alam

(Tangerang: Marjin Kiri).

- Emmerson, Donald K. (2001), *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia).
- Gibbons, Michael T. (2002), *Tafsir Politik* (Yogyakarta: Qalam).
- Gilarso, T. (2002), *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius)
- Hefner, Robert (1999), *Civil Islam* (Jakarta: ISAI).
- Husein, Umar, (1996), *Ekonomika* (Jakarta: Rajawali Press).
- Kahin, George T. (2013), *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia 1945-1949* (Depok: Bambu)
- Lauer, Robert H. (2000), *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Bandung: Rineka Cipta).
- Levitsky, Steven – Daniel Ziblatt (2019), *Bagaimana Demokrasi Mati?* (Jakarta: Gramedia).
- Lindbald, J. Thomas (2002) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Mallarangeng, Rizal (2002), *Mendobrak Sentralisme Ekonomi* (Jakarta: KPG – Gramedia).
- McVey (1992), Ruth, *Kapitalisme di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES).
- Mulgan, Geoff (1995), *Politik Dalam Sebuah Era Anti-Politik* (Jakarta: Buku Obor).
- Rachbini, Didik J. (2001), *Analisis Kritis Ekonomi – Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Silitonga, Samson Ganda J. (2021), *Demokrasi dan Civic Virtue* (Yogyakarta: Kanisius).
- S. Mulyadi (2003), *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: Rajawali).
- Soekarno (1962), *Di bawah Bendera Revolusi* (Djakarta: Panitia Penerbitan Di Bawah Bendera Revolusi).
- Staniland, Martin (1997), *Apakah Ekonomi – Politik Itu?* (Jakarta: Rajawali).
- Titaley (1991), Jhon A. *A Sociohistorical Analysis of The Pancasila as Indonesia's State ideologi In the Light of the Royal Ideology in the Davidic State* (San Anselmo: Berkley University).
- Widodo (1990), Suseno Triyanto, *Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: Kanisius).
- Winters, Jeffrey (1999), *Power in Motion* (Bandung: Sinar Harapan).
- Rocky Gerung (2018), "Pancasila: Ide Penuntun, Bukan Pengatur", dalam *PRISMA Vol 37* 2018.